



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara No 7-8 Jakarta Pusat Telepon (021) 3453510
www.kemendagri.go.id / otda.kemendagri.go.id

Nomor : 100.2.1.6/6386/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Atas Permohonan Fasilitasi
Rancangan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen.

Jakarta, 22 Agustus 2024
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
u.p. Sekretaris Daerah
di -
Tempat

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 180.0/1788 tanggal 29 Juli 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur sesuai dengan Wilayah Kerja Provinsi.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen agar tidak dilanjutkan ke tahapan berikutnya dan diubah ketentuannya menjadi Keputusan Gubernur.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Direktur Jenderal
Otonomi Daerah
Plh. Sekretaris Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Plh.Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Suryawan Hidayat, ST
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 196705071999031001

Tembusan:
Direktur Jenderal Otonomi Daerah.